



KAMIS, 17 MEI 2018

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

KPK Sudah Penjarakan 27 Pejabat Bengkulu

Herlambang: Bakal Terus Terulang

BENGKULU, BE - Total hingga saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menangkap 27 pejabat di Bengkulu terkait kasus korupsi (Lihat Daftar GRAFIS).

Operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Bengkulu Selatan (BS) Dirwan Mahmud, istri mudanya, Heni beserta keponakan, Wati dan Juhari, pihak swasta, merupakan kasus ke-lima operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Bengkulu.

Namun, KPK pertama kali menangani kasus di Bengkulu tidak terkait OTT, tetapi terkait laporan suap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan tahun jamak. Dalam kasus ini, tersangkanya adalah mantan Bupati Seluma Murman Effendi, serta Ketua dan anggota DPRD Seluma tahun 2013.

Pengamat hukum, Prof Dr Herlambang SH MH, mengatakan selama ini Bengkulu tercatat sebagai daerah terkorup nomor 5 di

Indonesia. Data ini pernah dirilis oleh KPK, sehingga sangat wajar Bengkulu menjadi target utama KPK dalam pemberantasan korupsi.

Terkait OTT menimpa Bupati BS Dirwan Mahmud, dia diprediksi bukan OTT terakhir terjadi di Bengkulu. Diperkirakan kedepan masih akan ada pejabat publik atau kepala daerah di Bengkulu yang terkena OTT KPK. "OTT KPK pasti akan terjadi lagi," ujarnya, Herlambang, Rabu (16/5).

Lantas bagaimana bisa kepala daerah terkena OTT?

Herlambang mengatakan, awal mula mereka terkena OTT karena biaya Pilkada yang mahal. Sehingga kepala daerah meminjam uang kemana-mana untuk mencukupi biaya Pilkada tersebut. Setelah mereka terpilih, tentunya pinjaman tersebut harus dikembalikan. Cara mereka mengembalikan

pinjaman adalah dengan memungut fee proyek dari Kepala Dinas, kontraktor atau pihak swasta lain. "Agar tidak terlalu terlihat publik, mereka melibatkan pihak ke-3 untuk memungut fee tersebut. Bisa dilakukan oleh istri atau saudara," katanya.

Dengan cara tersebut mereka mengira tidak akan terlibat atau dituduh KPK. Padahal cara tersebut bisa dibilang sasaran empuk KPK, karena sudah seperti kebiasaan di dilakukan pejabat. Terlebih lagi, KPK diketahui terus memantau perkembangan di Bengkulu.

"Cara tersebut sudah bisa dibaca dengan baik oleh KPK. Parahnya lagi, sudah tahu apa yang mereka lakukan itu salah, mereka tidak berhenti. Tidak heran jika OTT terjadi lagi," jelas Herlambang.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah sangat prihatin, Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski demikian, semua harus menghargai apa yang sudah menjadi tugas KPK, dalam memberantas korupsi. "Kita hargai kerja KPK. Saya juga

belum bisa banyak berkomentar tentang ini," terang Rohidin kepada BE, kemarin (16/5).

Menurutnya, saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan secara intensif kepada Bupati BS, bersama istri muda, salah satu PNS dan kontraktor terkait kasus suap itu. Apapun keputusannya nanti, itu

menjadi kewenangan KPK. "Kita tunggu dulu bagaimana perkembangan selanjutnya, sampai ada pernyataan resmi dari KPK," tambahnya.

Sementara itu, banyaknya kepala daerah ataupun mantan kepala daerah yang tersandung kasus hukum itu menjadi pecutan pahit untuk Bengkulu. Hal ini harus menjadi pelajaran

penting bagi semua kepala daerah. Sebab, pemimpin mempunyai tanggungjawab untuk menyelesaikan tugasnya demi mengabdikan kepada masyarakat. "Ini jadi pelajaran bersama, karena sebagai kepala daerah punya tanggungjawab besar kepada masyarakat," terang Rohidin. (151/167)